

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Daud, A. W. (2002). *H.I.R. Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Pusbakum.
- Harahap, M. Y. (2019). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. (2011). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar G Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki, Peter. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (1988). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Ramadhani. D. A. (2011). *Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya*. Jurnal: UPN Veteran Jakarta.
- Sarwono. (2007). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrio, J. (2014). *Wanprestasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Sembiring. J. (2011). *Cara Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jakarta: Visi Media.
- Setiawan, R. (1979). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Simanjuntak, P.N.H. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Subekti. (1985). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- _____. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Wardah, S. dan Sutiyoso, B. (2007). *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)

Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herzien Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*)

Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtrglement voor de Buitengenwesten, Staatsblad 1927:227*)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359)

C. Lain-Lain

Aprilia, D. dkk. (2020) *Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Tidak Dilakukan Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*. *Lex Privatum*, 8(2), hlm. 16-18

Dewi, N. M. (2022). *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa*. *Jurnal Analisis Hukum(JAH)*, 5(1), hlm. 82-83

Dewitasari, Y. (2015). *Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian*. Universitas Udayana, hlm. 3

Harefa, Billy. (2016). *KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN APABILA TERJADI WANPRESTASI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)*. *Privat Law*, 4(2), hlm. 117-119

HukumHukum.Com. (2015). *Asas Terang dan Tunai dalam Hukum Pertanahan Nasional*. <https://www.hukum-hukum.com/2015/08/asas-terang-dan-tunai-dalam-hukum.html> (diakses 13 Maret 2024)

- HukumOnline. (2023). *Catat! Ini 2 Macam Upaya Hukum Perdata*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/catat-ini-2-macam-upaya-hukum-perdata-lt63f6adcfdd1bf/> (diakses 1 November 2023)
- _____. (2012). *Fungsi Saksi Dalam Pembuktian Perjanjian Bawah Tangan*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-saksi-dalam-perjanjian-dibawah-tangan-lt5010cb6005182/> (diakses 12 Maret 2024)
- ILSLawFirm. (2023). *Apakah Sah Perjanjian Tanpa Saksi?*. <https://www.ilslawfirm.co.id/apakah-sah-perjanjian-tanpa-saksi/> (diakses 12 Maret 2024)
- JasaPengacaraOnline. *Pengertian dan Syarat Pengajuan Gugatan Balik (Rekonvensi)*. (2021). <http://www.jasapengacaraonline.com/pengertian-dan-syarat-pengajuan-gugatan-balik-rekonvensi/> (diakses 25 Oktober 2023)
- KemenkeuRI. (2011). *Upaya Hukum Dalam Hukum Acara Perdata*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>. (diakses 1 November 2023)
- Lawnesia. *Cara Mengajukan Rekonvensi atau Gugatan Balik*. <https://lawnesia.com/cara-mengajukan-rekonvensi-atau-gugatan-balik/> (diakses 25 Oktober 2023)
- Lawyersclub. (2020). *Syarat-Syarat Perjanjian dan Unsur-Unsur Perjanjian*. <https://www.lawyersclubs.com/syarat-syarat-perjanjian-dan-unsur-unsur-perjanjian/> (diakses 24 Oktober 2023)
- Mokodongan, R. dkk. (2020). *Gugatan Rekonvensi Dalam Sengketa Pertanahan Menurut Perspektif Hukum Perdata*. *Lex Privatum* 8(2), hlm. 126-127
- NagaraLaw. *Alur Proses Gugatan/Kasus Perdata Secara Umum di Indonesia*. <https://lawnesia.com/cara-mengajukan-rekonvensi-atau-gugatan-balik/> (diakses pada 25 Oktober 2023)
- Parlindungan, S.H., M.H. (2020). *Bingung Membedakan Perjanjian, Kontrak, dan Kesepakatan?* <https://riaubisnis.id/news/detail/3757/bingung-membedakan-perjanjian-kontrak-dan-kesepakatan> (diakses pada 24 Oktober 2023)

- Pengadilan Negeri Tegal. *Prosedur Pengajuan Perkara Perdata*. <https://pn-tegal.go.id/id/prosedur-pengajuan-perkara-perdata/#:~:text=Pihak%20berperkara%20datang%20ke%20Pengadilan,surat%20gugatan%20ditambah%20sejumlah%20Tergugat> (diakses 24 Oktober 2023)
- Ramadhani, F. (2009). *Gugatan Konvensi Dan Rekonvensi Yang Dikabulkan (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.KBM)* (Skripsi Sarjana, Universitas Jenderal Soedirman) hlm. 38
- Sunarto. (2016). *Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata: The Principle of Active Judge In Civil Case*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. 5(2), hlm. 252
- Susylawati, E. (2006). *Kewenangan Hakim Untuk Menilai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*. *Al-Ihkam*, 1(2), hlm. 223-224
- Tampanguma, C. dkk. (2021). *Kekuatan Hukum Pembuktian Dalam Perjanjian Akta Dibawah Tangan*. *Lex Privatum* 9(11), hlm. 236
- Trisnawati, P. (2020). *Jenis –Jenis Peralihan Hak Atas Tanah*. <https://pdb-lawfirm.id/jenis-jenis-peralihan-hak-atas-tanah/> (diakses pada 7 Februari 2024)
- Wibowo, W. (2008). *Gugat Balik (Rekonvensi) Sebagai Suatu Acara Penyelesaian Perkara Perdata Dalam Peradilan Di Pengadilan Negeri Klaten*. (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta) hlm. 2
- YukLegal. (2022). *Perbedaan Perjanjian Bawah Tangan Dan Perjanjian Notariil*. <https://yuklegal.com/perbedaan-perjanjian-bawah-tangan-dan-perjanjian-notariil/> (diakses 12 Maret 2024)